

PERMISIFITAS DAN KELANGSUNGAN HIDUP (*SURVIVAL*) WANITA TUNA SUSILA (WTS) DI DUSUN PETAMANAN DESA BANYUPUTIH

Sigit Prasetyo

Universitas Negeri Semarang

SARI

Prostitusi adalah masalah sosial klasik pada suatu negara. Prostitusi di suatu tempat seringkali dibenci oleh masyarakat, apalagi jika prostitusi berada di tengah masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat (permisifitas) sehingga akan memperngaruhi kelangsungan hidup (*survival*) dari WTS yang ada di tengah masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberadaan WTS dan bagaimana pengaruh tanggapan masyarakat terhadap kelangsungan aktivitas WTS di Dusun Petamanan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lokalisasi Petamanan yang berada di kawasan Pangkalan Truk Banyuputih. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tanggapan masyarakat Dusun Petamanan lebih bersikap netral, acuh tak acuh, dan cenderung membiarkan (permisif) terkait keberadaan lokalisasi dan WTS tersebut. Terkait kelangsungan hidup dari WTS yang berada di lokalisasi dan berdekatan dengan warga, sikap warga yang cenderung membiarkan (permisif) adanya lokalisasi dan WTS mengakibatkan WTS di lokalisasi sampai saat ini dapat melangsungkan hidupnya dengan baik tanpa ada penolakan yang cukup berarti (belum sampai tahap tindakan).

Saran, perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak prostitusi dan proses penularan/penyebaran HIV/AIDS. Bagi WTS, perlu diberikan pelatihan keterampilan agar kembali hidup normal di masyarakat.

Kata Kunci : Tanggapan Masyarakat (Permisifitas), Kelangsungan Hidup (*Survival*), WTS.

ABSTRACT

Prostitution is a classical social problem in a country. Prostitution is often hated by society, especially if it exists among the society. It will lead to various responses from the society so that will affect the survival of the existing prostitutes in the society. This study aimed to find out the society's response to the existence of prostitutes and how the response of the society affects the continuity of prostitutes' activities in Petamanan hamlet.

The approach used in this study was qualitative approach. The research was conducted at Petamanan prostitution place which is located around the truck parking area in Banyuputih. The data was collected through observation, interview, and documentation.

The results showed the response of Petamanan society was tend to be neutral, ignorant, and permissive to the existence of the prostitution place and prostitutes. The attitude of society which was tend to be permissive made the prostitutes in prostitution place can live normally without any rejection.

For suggestion, there should be education and socialization for the society related to prostitution effects and process of HIV/AIDS transmission. For the prostitutes, they need to get skill training so they can live normally within the society.

Keywords: Society Response (Permisiveness), Survival, Prostitutes.

PENDAHULUAN

Prostitusi adalah permasalahan sosial klasik yang berkembang di negara-negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Kartono (2013:208) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Patologi Sosial" bahwa prostitusi adalah profesi dengan usia sangat tua, setara umur kehidupan manusia itu sendiri. Walau pun prostitusi merupakan profesi yang sangat tua dan menjadi masalah sosial pada setiap negara, hingga sekarang bentuk penyimpangan ini masih sulit untuk ditemukan penyelesaiannya. Prostitusi yang pada dasarnya merupakan perilaku seks yang bebas tanpa batas kesopanan membuat profesi ini sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat.

Penolakan masyarakat terhadap prostitusi dikarenakan prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang perilakunya menyimpang dari norma dan moral di masyarakat. Selain itu, alasan lain penolakan masyarakat terhadap adanya prostitusi disebabkan penilaian masyarakat mengenai para WTS yang dianggap mengotori nilai-nilai perkawinan yang sejati, yaitu dengan melakukan hubungan seks di luar status perkawinan yang sah. Pada masyarakat yang menjunjung tinggi norma dan moral, adanya prostitusi di tengah masyarakat akan sangat dibenci dan ditentang.

Analisis tulisan ini dibangun dengan menggunakan landasan teoretis mengenai deviasi sosial dan prostitusi. Narwoko dan Suyanto (2006:107) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang (deviasi) adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma, dimana tindakan-tindakan tersebut tidak disetujui atau dianggap tercela dan akan mendapatkan sanksi negatif dari masyarakat. Prostitusi merupakan salah satu contoh bentuk deviasi sosial. Gail

Pheterson dalam Dreyfus (2013:8) menyatakan, "*prostitute is the prototype of the stigmatized woman because she is defined by her unchastity which casts her status as impure*" (pelacur adalah bentuk asli dari wanita yang ternodai karena dia digambarkan oleh ketidaksuciannya yang memberikannya status kotor atau tidak suci). Secara lebih jelas, Aprilianingrum (2006:39) menggambarkan Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai wanita (ada juga pria) yang memiliki pekerjaan menjual diri kepada orang lain yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual untuk mendapatkan imbalan atau bayaran dari pemakai.

Menurut Kartono (2013:20), alasan sebagian WTS untuk melakukan pekerjaan menjual diri adalah perasaan tidak puas terhadap pekerjaan yang lalu, karena upah yang tidak mencukupi untuk membeli jenis-jenis perhiasan dan pakaian yang diinginkannya. Deviasi jenis ini disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional/ sosial di luar individu atau oleh pengaruh situasi, di mana pribadi yang bersangkutan menjadi bagian integral dari dirinya. Situasi tersebut memberikan pengaruh yang memaksa, sehingga individu tersebut terpaksa harus melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal.

Kelangsungan hidup WTS yang berada di tengah masyarakat diwarnai dengan penolakan-penolakan dari berbagai pihak. Di lain sisi, sebagian dari WTS tersebut tidak memiliki banyak pilihan untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya terkait keterbatasan ekonomi. WTS tetap dianggap sebagai manusia yang memiliki kesempatan yang sama dalam mempertahankan hidupnya, hanya profesinya sebagai WTS lah yang sangat dibenci oleh masyarakat karena melanggar norma dan moral yang berlaku di masyarakat.

Mengenai prostitusi dan hubungannya dengan masyarakat, Kartono (2013: 257) mengemukakan bahwa semakin ditekan prostitusi, maka akan semakin luas menyebar prostitusi tersebut. Sikap reaktif dari masyarakat luas mengenai hal tersebut bergantung pada empat faktor, yang meliputi (1) derajat penampakan/visibilitas tingkah laku, yaitu menyolok tidaknya perilaku immoral para PSK; (2) besarnya pengaruh yang mendemoralisasi lingkungan sekitarnya; (3) kronis tidaknya kompleks tersebut menjadi sumber penyakit kotor *syphilis* dan *gonorrhoe*, dan penyebab terjadinya abortus (keguguran) serta kematian bayi-bayi; (4) pola kultural: adat-istiadat, norma-norma susila dan agama yang menentang prostitusi, yang sifatnya represif dan memaksakan.

Reaksi sosial itu bisa bersifat menolak sama sekali dan mengutuk keras serta memberikan hukuman berat sampai pada sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh serta menerima dengan baik. Sikap menolak bisa bercampur dengan rasa benci, ngeri, jijik, takut, dan marah, sedangkan sikap menerima bisa bercampur dengan rasa senang, memuji-muji, mendorong, dan simpati. Apabila deviasi atau penyimpangan tingkah laku berlangsung terus-menerus dan jumlah WTS menjadi semakin banyak menjadi kelompok-kelompok *deviant* dengan tingkah lakunya yang menyolok, maka terjadilah perubahan pada sikap dan organisasi masyarakat terhadap prostitusi. Lebih dari itu, hal ini dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam kebudayaan itu sendiri. Stigma atau noda sosial dan eksploitasi-komersialisasi seks yang semula dikutuk hebat berubah dan menjadi suatu hal yang dapat diterima sebagai gejala sosial yang umum dalam masyarakat (Kartono, 2013:258).

Pada era modern sekarang ini, penyimpangan sosial seperti prostitusi

mulai merambah masuk di tengah masyarakat. Hal ini akan menimbulkan keresahan pada generasi berikutnya apabila penyimpangan sosial seperti prostitusi tersebut dianggap biasa oleh masyarakat. Keberadaan lokalisasi dan WTS di tengah masyarakat seperti tidak ada penolakan lagi bagi masyarakat. Masyarakat cenderung lebih bersikap acuh tak acuh dan membiarkan keberadaan prostitusi. Hal tersebut tidak terjadi begitu saja, upaya penolakan oleh masyarakat sudah dilakukan tetapi prostitusi masih berlangsung, maka dengan demikian masyarakat lebih mempercayakan penanggulangan prostitusi kepada pemerintah.

Salah satu prostitusi yang masih hidup di tengah masyarakat terletak di Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Lokalisasi tersebut tepatnya berada di belakang Pangkalan Truk Banyuputih yang langsung berdekatan dengan permukiman warga. Keberadaan lokalisasi tersebut sudah cukup lama dan berdampingan langsung dengan warga masyarakat Dusun Petamanan, upaya penolakan sudah dilakukan, akan tetapi tidak ada penolakan yang sampai pada tindakan. Masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih cenderung membiarkan (permissif) dengan adanya lokalisasi dan WTS di lokalisasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tanggapan masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih terhadap keberadaan WTS, dan (2) mengetahui pengaruh tanggapan masyarakat terhadap kelangsungan aktivitas WTS di Dusun Petamanan Desa Banyuputih. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka secara teoretis, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait

deviasi atau penyimpangan sosial serta sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kajian tentang teori sosial, sedangkan manfaat praktis dari tulisan ini adalah memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai permisifitas dan kelangsungan hidup (*survival*) Wanita Tuna Susila (WTS) di Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, serta menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang, dalam menangani masalah prostitusi di daerah setempat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2010:6).

Penelitian ini dilaksanakan di Lokalisasi Petamanan yang berada di kawasan pangkalan truk Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Kawasan tersebut merupakan tempat WTS di Dusun Petamanan Desa Banyuputih dilokalkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) observasi terhadap objek penelitian; (b) wawancara dengan narasumber yang meliputi para Wanita Tuna Susila (WTS), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang, LSM FKPB (Forum Komunikasi Peduli Batang), Pelanggan WTS, dan Kepala Dusun Petamanan dan atau Kepala Desa

Banyuputih serta warga masyarakat Dusun Petamanan, dan; (c) dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan Masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih cenderung membiarkan (permisif) terhadap adanya lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya. Warga tidak merasa keberatan dengan keberadaan lokalisasi tersebut selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh desa. Jika masyarakat menutup atau membubarkan lokalisasi di Dusun Petamanan, dikhawatirkan akan muncul praktik-praktik prostitusi seperti yang terjadi pada masa dahulu, yakni para WTS menjajakan dirinya di sepanjang jalan pantura. Hal ini akan memberikan dampak yang kurang baik, khususnya bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan moralnya.

Menurut Kepala Desa Banyuputih, tidak semua warga setuju dengan adanya lokalisasi di lingkungan mereka, namun masyarakat cenderung memaklumi karena lokalisasi tersebut sudah lama dan belum ditemukan penyelesaian yang lebih baik mengenai keberadaannya.

Keberadaan prostitusi di tengah masyarakat memunculkan pro dan kontra. Warga Dusun Petamanan Desa Banyuputih menunjukkan sikap netral terhadap adanya prostitusi dan lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya. Warga cenderung membiarkan (permisif), walaupun berdasarkan hasil wawancara, sebagian warga sebenarnya kurang setuju dengan keberadaan prostitusi tersebut. Selain karena kebijakan dari pemerintah daerah, lokalisasi yang berada di Dusun Petamanan juga berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah. Oleh sebab itu, warga Dusun Petamanan Desa Banyuputih memilih bersikap netral, acuh

tak acuh, dan cenderung membiarkan (permisif) dengan adanya lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya.

Dalam perkembangannya, beberapa aturan diciptakan seiring dengan munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif keberadaan prostitusi di lingkungan mereka. Sebagai contoh, kekhawatiran masyarakat yang timbul karena suara musik yang sangat keras yang bersumber dari lokalisasi hingga larut malam yang mengganggu warga sekitar lokalisasi, hingga kekhawatiran terkait perkembangan moral anak dan remaja di sekitar. Menanggapi hal tersebut, pemerintah desa mengeluarkan peraturan-peraturan desa seperti larangan menyalakan musik setelah pukul 24:00 WIB, hingga mengadakan kegiatan rutin keagamaan agar anak-anak dan remaja tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah sehingga mengurangi rasa kekhawatiran para orang tua dan bagi penerus mereka warga Desa Banyuputih.

Kartono (2013:258) menyatakan bahwa reaksi sosial dapat bersifat menolak sama sekali dan mengutuk keras serta memberikan hukuman berat sampai pada sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh serta menerima dengan baik. Reaksi Warga masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih lebih pada sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh terhadap adanya lokalisasi dan WTS yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Kelangsungan Hidup (*Survival*) Wanita Tuna Susila (WTS) di Dusun Petamanan Desa Banyuputih

Prostitusi di pantura Banyuputih sudah ada sejak lama. Sebelum ada lokalisasi di belakang pangkalan truk Desa Banyuputih, dimana para WTS diorganisir secara rapi dan tertib, WTS tersebar di tepi jalan pantura. Masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih lebih bersikap

membiarkan dengan adanya lokalisasi di Dusun Petamanan karena warga menyadari bahwa lokalisasi adalah salah satu solusi dari adanya prostitusi di tempat umum, yang dianggap lebih mengkhawatirkan karena terlihat jelas oleh anak-anak dan remaja.

Kelangsungan hidup WTS di lokalisasi Dusun Petamanan Desa Banyuputih sama seperti warga masyarakat pada umumnya. Tidak ada penolakan yang sangat keras dari warga masyarakat Dusun Petamanan, juga tidak ada penerimaan atau tenggang rasa yang sangat baik. Masyarakat bersikap netral, acuh tak acuh, dan cenderung membiarkan keberadaan WTS di Dusun Petamanan Desa Banyuputih. Hal tersebut yang mengakibatkan WTS di Lokalisasi Petamanan dapat melangsungkan hidupnya dengan baik menurut versi mereka, tanpa ada penolakan yang cukup berarti dari warga. Hal ini membuat mereka tenang dalam menjalankan pekerjaannya setiap hari sebagai WTS.

Prostitusi dan pilihan pekerjaan sebagai WTS adalah contoh perilaku menyimpang. Hubungan seks yang sesuai dengan norma adalah hubungan seks melalui status perkawinan yang sah, sedangkan prostitusi adalah tindakan yang menyimpang dan melanggar norma karena melakukan hubungan seks di luar status perkawinan yang sah. Perilaku yang menyimpang dari norma-norma tersebut tidak disetujui atau dianggap tercela oleh masyarakat, namun norma-norma tersebut terpaksa dilanggar oleh para WTS untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Prostitusi sudah dianggap biasa di Dusun Petamanan karena terjadi berulang-ulang dan terus menerus, sehingga dikhawatirkan akan memperkuat penyimpangan dan terjadi disorganisasi sosial atau keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. Dusun Petamanan Desa

Banyuputih adalah desa dengan faktor agama yang cukup kuat dibuktikan dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin. Hingga saat ini, prostitusi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka masih bisa dikontrol hanya pada ruang lingkup lokalisasi saja, tidak merambah masuk ke lingkungan warga masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Banyuputih selalu berperan aktif dalam menangani masalah lokalisasi yang terdapat di desanya. Pemerintah Desa berperan sebagai penyeimbang dan penyalur aspirasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan warga masyarakat Dusun Petamanan. Koordinasi antara warga masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih, warga kompleks lokalisasi Dusun Petamanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selalu dilakukan agar masalah prostitusi ini dapat ditanggulangi dengan solusi terbaik. Penanggulangan dengan membubarkan lokalisasi bukan solusi terbaik, karena dampaknya prostitusi justru akan menyebar luas dan tidak terkontrol.

Penanggulangan prostitusi di Kabupaten Batang sudah dilakukan. Pemberantasan prostitusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011, penanganan prostitusi yang berkembang di Kabupaten Batang dilakukan dengan cara pembinaan, dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud

dilakukan melalui kegiatan: (a) Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis; (b) bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniah dan jasmaniah. Dalam rangka menanggulangi prostitusi di Kabupaten Batang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang mengadakan program rehabilitasi bagi para WTS. Selain itu pihak LSM Forum Komunikasi Peduli Batang (FKPB) juga mengadakan pendampingan (memberi motivasi dan keterampilan) bagi para WTS. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang merehabilitasi dengan cara menyalurkan para WTS atau eks-WTS ke panti sosial di Kota Surakarta. Selama 6 bulan WTS tersebut akan mendapatkan pelatihan keterampilan, dengan harapan para WTS tersebut dapat kembali ke masyarakat dan hidup lebih produktif. Pelatihan-pelatihan keterampilan kepada WTS di Kabupaten Batang juga diberikan selama program pendampingan LSM FKPB.

Cara menanggulangi prostitusi di Kabupaten Batang yang sudah umum adalah melalui lokalisasi. Dalam bentuk lokalisasi semuanya terkontrol dengan baik. Mulai dari administrasi (keanggotaan) hingga kesehatan. Sebenarnya, dengan maraknya lokalisasi di Kabupaten Batang membuat warga sekitar resah akan perkembangan moral anak-anak dan remaja, khususnya di Dusun Petamanan Desa Banyuputih. Lokalisasi yang berdekatan langsung dengan warga membuat orang tua resah apabila anak-anak mereka ikut terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Orang tua harus memberikan perhatian ekstra kepada anak-anaknya agar perkembangan moralnya baik dan sesuai dengan tuntunan agama.

SARAN

Bagi masyarakat, perlu edukasi dan sosialisasi terkait dampak prostitusi dan proses penularan/penyebaran HIV/AIDS. Pengawasan juga harus dilakukan lebih intens kepada anak agar tidak sesekali mencoba masuk ke dunia prostitusi. Bagi WTS, perlu diberikan pelatihan keterampilan agar kembali hidup normal di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianingrum, Farida. 2006. '*Faktor Risiko Kondiloma Akuminata Pada Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus pada PSK Resosialisasi Argorejo Kota Semarang)*'. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dreyfus, Tom. 2013. 'Sex, Work, Law and Sex Work Law: Towards a Transformative Feminist Theory'. *An Online Feminist Journal*. Vol. 4, Issue 1. Melbourne: University of Melbourne.
- Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial-Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua puluh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang*. Batang.
- Peraturan Daerah. 2015. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang*. JDIIH Kabupaten Batang. <http://jdih.batangkab.go.id>. Diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 14:52:47.

